



TAHUN 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar kepada masyarakat (stakeholders) pada Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan atas dasar Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2021– 2026.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 ini menyajikan informasi realisasi capaian hasil kinerja sasaran strategis selama Tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 beserta analisisnya. Realisasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar selalu berupaya untuk mewujudkan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang mudah, cepat, ramah dan transparan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Blitar, 15 Februari 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KOTA BLITAR

HERU EKO PRAMONO, S.STP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

EXECUTIF SUMMARY

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam hal membantu Walikota mencapai visi misi yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP mendukung **Misi 3** “Berdikari Secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital” dan **Misi 5** “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar 2021-2026 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Blitar 2021-2026 menetapkan Tujuan dan Sasaran yang harus dicapai pada setiap tahunnya. Tujuan dan Sasaran tersebut adalah:

No	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya nilai investasi daerah	Meningkatnya jumlah realisasi investasi
2	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,2
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat tercapai seluruhnya, sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,2	345,22	206,5%
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	A (85,47)	100,8%

Dalam mencapai target kinerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Dan PTSP didukung oleh anggaran sebesar Rp. 5.424.516.228 dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,2	345,22	206,5%	1.268.521.441,-	1.169.138.725,-	92,2%
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	A (85,47)	100,8%	4.155.994.787	3.953.802.809	95,13%

Dari capaian realisasi kinerja dan anggaran tersebut, terdapat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	206,5%	92,2%	2,24
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	95,13%	1,05

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Executive Summary	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Dasar Hukum	6
E. Aspek-Aspek Strategis	8
F. Isu-Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis 2021-2026	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	12
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan	13
Realisasi Tahun 2022	
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021- 2022 ...	17
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun s.d akhir	18
Periode Renstra	
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi	
Nasional (Target SPM)	
B. Akuntabilitas Keuangan	19
1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	19
2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	20
3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
C. Prestasi/Penghargaan	
BAB IV PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Langkah Perbaikan	22

Lampiran :

- Matrik Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditindaklanjuti secara teknis dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), yang dapat diketahui tingkat akuntabilitasnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD dan Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran 2022 yang disempurnakan dengan dokumen perubahan Perjanjian Kinerja. Dokumen LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar serta sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kinerja dan kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyusunan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Penyusunan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
7. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, kererausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
8. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

9. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup dinas;
10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

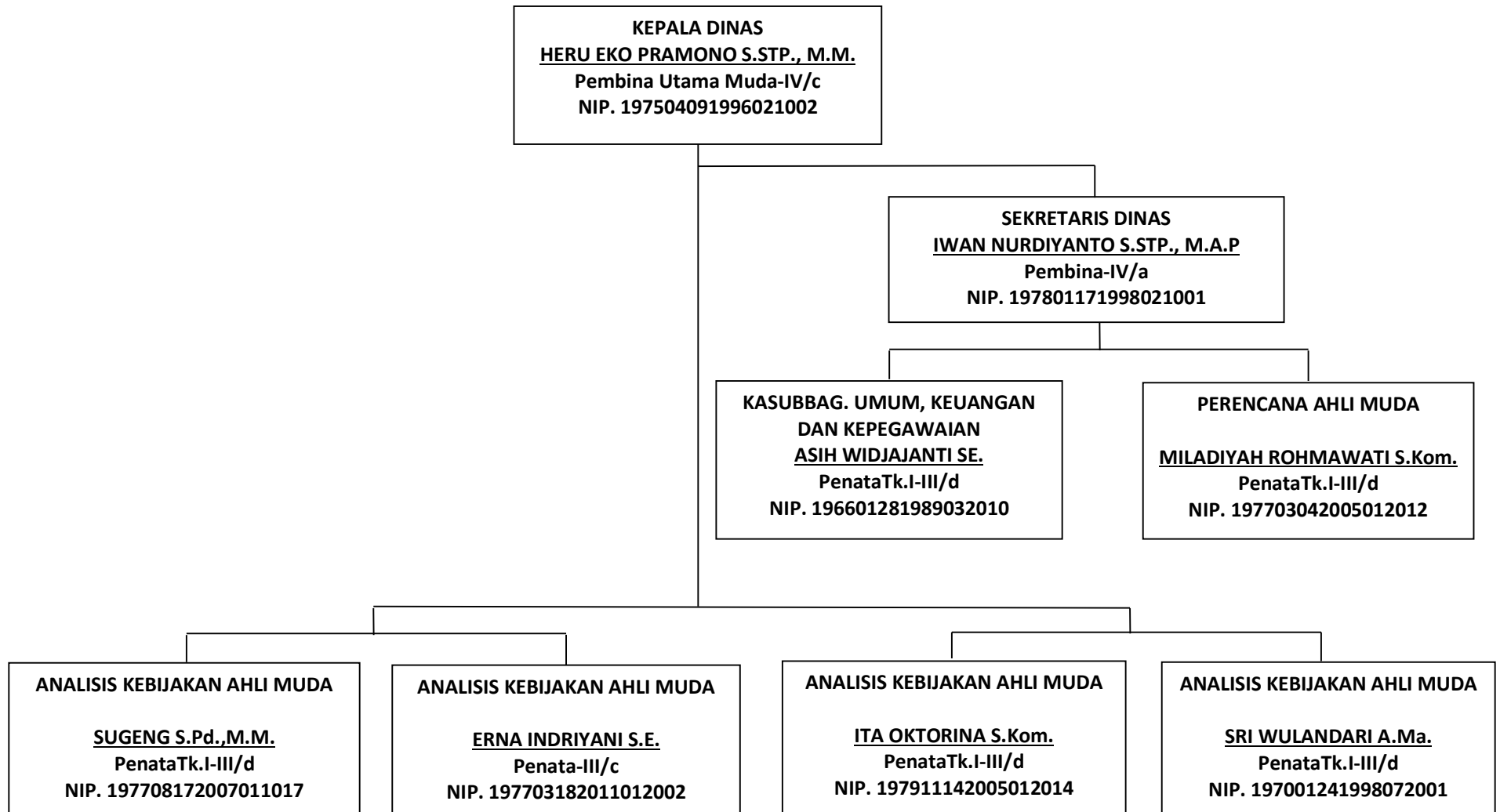
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar didukung oleh 40 (empat puluh) personil. Adapun penggolongan pegawai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Berdasarkan Pangkat/Gol., Tingkat Pendidikan dan Jabatan Tahun 2022

No	Pangkat/ Gol. Ruang	Jenis Kelamin			Ket
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1	
2	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-	
3	Pembina (IV/a)	1	-	1	
4	Penata Tk. I (III/d)	2	4	6	
5	Penata (III/c)	-	1	1	
6	Penata Md Tk I (III/b)	-	-	-	
7	Penata Muda (III/a)	1	3	4	
8	Pengatur Tk I (II/d)	4	1	5	
9	Pengatur (II/c)	1	4	5	
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-	
11	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1	
12	Tanpa pangkat/gol.	12	4	16	Non PNS
	Jumlah	23	17	40	

	Tingkat Pendidikan				
1	Pasca Sarjana (S2)	2	-	2	
2	Sarjana (S1)	9	7	16	
3	Diploma	2	5	7	
4	SLTA	9	5	14	
5	SLTP	1	-	1	
6	SD	-	-	-	
	Jumlah	23	17	40	
	Jabatan				
1	Pejabat Struktural	2	1	3	
2	Pejabat Fungsional	1	4	5	
3	Pelaksana / Staff	20	12	32	
	Jumlah	23	17	40	

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Blitar



C. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal & PTSP Tahun 2022 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. Aspek-Aspek Strategis

Aspek-aspek strategis merupakan aspek-aspek yang menjadi visi, misi dan tujuan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang nilai-nilai dalam organisasi.

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar untuk mencapai target kinerja tahun 2022 adalah:

1. Adanya peta potensi investasi sebagai salah satu upaya dalam mendukung promosi investasi Kota Blitar.
2. Pendampingan penyusunan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) bagi perusahaan yang wajib LKPM.
3. Pengembangan aplikasi perizinan On-Line sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

F. Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatkan promosi penanaman modal yang inovatif.
2. Meningkatkan penyediaan data dan informasi penanaman modal.
3. Meningkatkan pelayanan perizinan.
4. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan publik

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana amanat pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa *Perangkat daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD*. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif, yang merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana diatur pada pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, RENSTRA juga merupakan dokumen bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, wajib menyusun rencana strategis. RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar 2021-2026 tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun

kedepan. Tujuan disusun dengan mengacu visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan urusan Penanaman Modal (termasuk didalamnya pelayanan perizinan) mendukung pencapaian visi dan misi Walikota, yaitu Misi 3 dan Misi 5. Pada sasaran strategis “Meningkatnya jumlah realisasi investasi” mendukung **Misi 3** “Berdikari Secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital”, pada **Tujuan 2** “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi”, **Sasaran 1** “Meningkatnya nilai investasi daerah”. Sedangkan sasaran strategis “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” mendukung **Misi 5** “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi” pada **Tujuan 1** “Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi”, **Sasaran 7** “Meningkatnya tata kelola perangkat daerah”

Untuk mencapai Sasaran RPJMD Kota Blitar dan Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP maka ditetapkan sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya nilai investasi daerah	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Peningkatan kondusivitas iklim investasi	• Optimalisasi identifikasi potensi investasi • Peningkatan dukungan kelembagaan dalam peningkatan minat investasi • Peningkatan promosi investasi • Peningkatan pengelolaan data potensi investasi yang terintegrasi dengan sistem

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	tata ruang Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,2
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (84,8)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong instansi fokus pada pencapaian sasaran. Dalam upaya pencapaian sasaran perlu sebuah alat ukur yang dinamakan indikator kinerja berupa :

- Hasil (*outcome*), bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) atas program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan;
- Keluaran (*output*), bagaimana produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya program dan kegiatan berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja merupakan sebuah proses sistematis dan berkelanjutan untuk menilai tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja sasaran strategis yang didukung kegiatan perangkat daerah, sesuai target kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,2	345,22	206,5%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	A (85,47)	100,8%

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

a) Meningkatkan Jumlah Realisasi Investasi

Realisasi investasi dihitung dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan secara rutin pada tiap triwulan melalui aplikasi OSS (On-line Single Submission) oleh perusahaan-perusahaan di Kota Blitar. Walaupun masih ada sebagian perusahaan yang belum menyampaikan LKPM, namun capaian realisasi investasi yang diperoleh merupakan gambaran kondisi penanaman modal di Kota Blitar. Jumlah realisasi investasi yang diperoleh sebesar 345,22 milyar rupiah dari target sebesar 167,2 milyar rupiah. Capaian jumlah realisasi tersebut lebih dari 100% dari target yaitu 206,5%.

Jumlah realisasi tahun 2022 juga meningkat dibanding tahun 2021 yang sebesar 258,46 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Blitar telah bangkit setelah masa krisis akibat pandemi covid19.

Berikut disajikan tabel realisasi investasi tahun 2022 menurut bidang usaha :

Tabel 3.2
Data Realisasi Investasi Per Bidang Usaha Kota Blitar Tahun 2022

NO	BIDANG USAHA	TRIBUNAN I			TRIBUNAN II			TRIBUNAN III			TRIBUNAN IV			JUMLAH TAHUN 2022		
		Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0	0	0	1	0	0	6	0	0	5	155,200,000	0	12	155,200,000	0
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	3	0	0	13	85,500,000	7	3	0	0	19	85,500,000	7
3	Industri Pengolahan	4	157,247,900	0	20	906,557,174	31	25	274,672,000	17	173	3,344,012,637	47	222	4,682,489,711	95
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	2	359,619,239	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	6	359,619,239	0
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Konstruksi	19	751,000,000	12	109	10,808,134,073	1	68	5,363,888,336	53	150	16,149,700,008	97	346	33,072,722,417	163
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	60	39,120,356,582	21	142	41,979,969,859	141	57	14,334,725,572	48	318	100,598,824,159	335	577	196,033,876,172	545
8	Pengangkutan dan Pergudangan	9	757,959,996	0	13	0	0	2	0	0	22	10,800,000	0	46	768,759,996	0
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4	766,526,034	0	12	43,461,770	0	5	2,329,501,636	3	16	528,600,000	10	37	3,668,089,440	13
10	Informasi dan Komunikasi	5	249,289,234	0	13	442,773,648	11	9	13,000,000	1	34	944,233,892	33	61	1,649,296,774	45
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	BIDANG USAHA	TRIBUNAN I			TRIBUNAN II			TRIBUNAN III			TRIBUNAN IV			JUMLAH TAHUN 2022		
		Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)
12	Real Estat	0	0	0	1	6,670,860,000	0	1	0	1	2	700,000,000	3	4	7,370,860,000	4
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	4	122,962,759	0	7	0	0	17	1,705,000,000	1	49	1,495,900,000	11	77	3,323,862,759	12
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	6	0	0	19	750,000	1	8	76,914,700	4	85	91,100,000	0	118	168,764,700	5
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pendidikan	1	60,000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	60,000	0
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3	23,175,000	0	4	586,350,674	2	6	34,162,229,931	67	8	58,476,461,004	62	21	93,248,216,609	131
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0	0	0	0	0	0	1	194,166,934	23	0	0	0	1	194,166,934	23
19	Aktivitas Jasa Lainnya	0	0	0	11	6,500,000	0	8	120,000,000	2	24	313,690,000	0	43	440,190,000	2
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	BIDANG USAHA	TRIBUNAN I			TRIBUNAN II			TRIBUNAN III			TRIBUNAN IV			JUMLAH TAHUN 2022		
		Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Org)
	JUMLAH	117	42,308,196,744	33	357	61,445,357,198	187	227	58,659,599,109	227	891	182,808,521,700	598	1592	345,221,674,751	1045

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa investasi terbesar di Kota Blitar adalah dibidang usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Perusahaan yang mendukung jumlah investasi terbesar dibidang tersebut adalah PT. Hariputra Santosa Jaya dengan investasi sebesar Rp. 62.750.910.345,- dan PT. Mahapura Jaya Sakti sebesar Rp. 40.102.273.810,-.

b) Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja perangkat daerah yang diperoleh dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Tahun 2022 memperoleh predikat A (Memuaskan) dengan nilai 85,47. Pada Tahun 2021 juga memperoleh predikat A dengan nilai 84,80. Jadi ada kenaikan nilai sebesar 0,67.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2021	2022	2021	2022
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	166,67	167,2	258,46	345,22
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A (84,8)	A (84,8)	A (85,47)

Realisasi investasi tahun 2022 meningkat sebesar 86,76 milyar rupiah atau sekitar 25% dari tahun 2021. Hal ini karena sektor usaha di Kota Blitar kembali tumbuh dan berkembang setelah mengalami penurunan akibat pandemi covid19. Selain itu juga didukung oleh penyampaian LKPM yang tertib dari para pengusaha di Kota Blitar.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Kota Blitar dan Kabupaten Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi	
		Kota Blitar	Kabupaten Blitar
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	345,22	1.724.34

Realisasi investasi Kota Blitar hanya sebesar 20% dari realisasi investasi Kabupaten Blitar. Tentu saja jauh selisihnya sebab Kabupaten Blitar memiliki potensi investasi yang lebih banyak dan beragam karena didukung oleh luas wilayahnya. Luas wilayah Kota

Blitar jauh lebih kecil dibanding luas wilayah Kabupaten Blitar yaitu 32 km² : 1.589 km². atau luas Kota Blitar hanya 2% dibanding luas wilayah Kabupaten Blitar.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi	
		Kota Blitar	Prov. Jatim
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	345,22	110.329,47

Kota Blitar menyumbang 0,3% dari realisasi investasi Provinsi Jawa Timur. Kecil memang, karena Kota Blitar merupakan kota kecil kedua (setelah Kota Mojokerto) di Jawa Timur dan tidak memiliki kawasan industri.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	842,9	345,22	40,96%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daeah	A (85,1)	A (85,47)	100,4%

Target realisasi investasi pada akhir Renstra (tahun 2026) adalah Rp 842,9 (milyar) dan telah tercapai 40,96% pada Tahun I Renstra (tahun 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pada akhir renstra realisasi investasi dapat tercapai. Sedangkan untuk Nilai SAKIP perangkat daerah (85,47) telah melampaui target akhir renstra (85,1).

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.7 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	1.268.521.441	23,38
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.155.994.787	76,62%
Total anggaran		5.424.516.228	100%

Sasaran Strategis “Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi” didukung anggaran sebesar Rp. 1.268.521.441,- atau 23,38% dari keseluruhan anggaran. Sedangkan sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” didukung anggaran sebesar Rp. 4.155.994.787,- atau 76,62% termasuk didalamnya gaji pegawai sebesar Rp. 3.223.397.137,-.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,2	345,22	206,5	1.268.521.441	1.169.138.725	92,17
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yg teridentifikasi	45	50	111,11	22.847.500	22.479.100	98,39
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	40	43	107,5	356.109.794	353.716.234	99,33
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP	99,5	99,53	100	503.828.147	491.181.131	97,49
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	75	71,22	94,96	385.736.000	301.762.260	78,23
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	A (85,47)	100,8	4.155.994.787	3.953.802.809	95,13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,9	84,16	100,3	4.155.994.787	3.953.802.809	95,13
Total Anggaran					5.424.516.228	5.122.941.534	94,44

Sasaran Strategis “Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi” didukung oleh 4 (empat) program, yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Kinerja masing-masing program dapat tercapai kecuali kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tercapai 94,96%. Untuk realisasi anggaran juga tercapai diatas 95% kecuali Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang tercapai 78,23%.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	206,5	92,17	2,24
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,8	94,44	1,07
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		153,65	93,31	1,65

Atas kinerja yang tercapai dan anggaran yang terrealisasi terdapat efisiensi sebesar 2,24 dan 1,07. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP mampu menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal.

C. Prestasi/Penghargaan

- Juara 2 (dua) Lomba Inovation Goverment Award Tingkat Kota dengan judul Inovasi “**LAPIS MANIS**” (Lacak Peluang Investasi Aman dan Efisien berbasis WebGis).
- Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan Nilai Kepatuhan **81,66** (masuk dalam Zona Hijau dengan Kategori B dan Opini Kualitas Tinggi).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP atas penggunaan anggaran Tahun 2022. Urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikut adalah target dan realisasi sasaran strategis :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,2	345,22	206,5%
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	A (85,47)	100,8%

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar diberikan anggaran sebesar Rp.5.424.516.228,- yang terbagi dalam 5 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 5.122.941.534,- (94,44%).

B. LANGKAH PERBAIKAN

Untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja yang telah baik, maka perlu beberapa upaya perbaikan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan mall pelayanan publik agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik dalam satu tempat.

2. Meningkatkan promosi investasi secara On Line baik melalui media sosial maupun website agar calon investor mengetahui potensi yang dimiliki Kota Blitar sehingga tertarik untuk melakukan investasi.
3. Meningkatkan Bimtek OSS dan pendampingan LKPM agar pelaku usaha tertib dalam pelaporan LKPM.
4. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran perizinan berusaha agar masyarakat yang memiliki usaha mempunyai legalitas izin.

Secara internal laporan kinerja ini dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi sehingga Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar semakin baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar dibuat, dengan harapan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Blitar, 15 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KOTA BLITAR



HERU EKO PRAMONO, S.STP, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Lampiran A

Matrik Rencana Strategis
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggungja wab	Lokasi
					Data Awal	2022					
						K	Rp				
Meningkatnya nilai investasi daerah			Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Jumlah realisasi investasi tahun N - Jumlah realisasi investasi tahun N-1/ Jumlah realisasi investasi tahun N-1 x 100%	-37,15%	0,30%		0,30%		0,30%	
	Meningkatnya jumlah realisasi investasi		Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,1 (milyar rupiah)	167,2		167			
		Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Jumlah Potensi Investasi yang teridentifikasi Th N - Jumlah potensi Investasi yang teridentifikasi Th N-1 / Jumlah Potensi Investasi yang teridentifikasi Th N-1 x 100%	40	45%	63.999.950	45%	63.999.950	Bid. Penanaman modal	Kota Blitar
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	NA	1	63.999.950	1 dokumen	63.999.950		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggungja wab	Lokasi
					Data Awal	2022					
						K	Rp				
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang disusun	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang disusun	NA	0	-	-	-		
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun	NA	1	63.999.950	1 dokumen	63.999.950		
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 dokumen	0	-	-	-		
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yg tersusun	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yg tersusun	1 dokumen	0	-	-	-		
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen updating data peta potensi dan peluang usaha yang tersusun	Jumlah dokumen updating data peta potensi dan peluang usaha yang tersusun	NA	0	-	-	-		
		Program Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	Jumlah Potensi Investasi yang dipromosikan Th N - Jumlah Potensi Investasi yang dipromosikan Th N-1/ Jumlah Potensi Investasi yang dipromosikan Th N-1 x 100%	NA	40%	64.279.000	40%	64.279.000	Bid. Penanaman modal	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggungja wab	Lokasi
					Data Awal	2022					
						K	Rp				
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase investor baru yang terverifikasi	Jumlah investor baru yang terverifikasi/ Jumlah investor baru x100%	NA	20%	64.279.000	20%	64.279.000		
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yg menyatakan berminat untuk bekerjasama	Jumlah perusahaan yg menyatakan berminat untuk bekerjasama	0 perusahaan	0	-	-	-		
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penanaman modal yang dilaksanakan	Jumlah kerjasama penanaman modal yang dilaksanakan	2 kerjasama	1	64.279.000	1	64.279.000		
		Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N - Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N-1 /Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N-1 X 100%	0	75%	372.641.850	75%	372.641.850	Bid. Penanaman modal	Kota Blitar
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	NA	50	372.641.850	50	372.641.850		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan monev Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan monev Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	NA	300	75.075.800	300	75.075.800		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggungja wab	Lokasi
					Data Awal	2022					
						K	Rp				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pendampingan dalam hal Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pendampingan dalam hal Laporan Kegiatan Penanaman Modal	72 perusahaan	30	157.366.350	30	157.366.350		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	NA	80	140.199.700	80	140.199.700		
		Program Pelayanan penanaman modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	Jumlah izin terbit tepat waktu/ Jumlah izin yang diterbitkan * 100%	98,4%	99,5%	249.973.347	99,5%	249.973.347	Bid. Perizinan	Kota Blitar
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	Pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N - pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N-1 / pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N-1 x100%	NA	3,0%	249.973.347	3,0%	249.973.347		
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan izin usaha yang terverifikasi berkewajiban memenuhi komitmen	Jumlah permohonan izin usaha yang terverifikasi berkewajiban memenuhi komitmen	NA	1.030	44.935.500	1.030	44.935.500		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggungja wab	Lokasi
					Data Awal	2022					
						K	Rp				
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah izin yang terbit secara tepat waktu	Jumlah izin yang terbit secara tepat waktu	3300 izin	3748	167.714.447	3.748	167.714.447		
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah layanan konsultasi dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah layanan konsultasi dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	3 pengaduan	4	37.323.400	4	37.323.400		
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A	A		A			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,33	83,9	4.151.949.349	83,9	4.151.949.349	Sekretariat dinas	Kota Blitar
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar/dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun X 100%	100%	100%	2.107.500	100%	2.107.500		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	3 dokumen	3	1.390.500	3	1.390.500		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	3 dokumen	3	717.000	3	717.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggungja wab	Lokasi
					Data Awal	2022					
						K	Rp				
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar/Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan x 100%	100%	100%	3.160.996.299	100%	3.610.996.299		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	29 org	33	3.568.684.299	33	3.568.684.299		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	1 dok	1	42.312.000	1	42.312.000		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar/Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	100%	100%	205.670.800	100%	205.670.800		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	29 stell	3	5.670.800	3	5.670.800		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	2 publikasi	2	200.000.000	2	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggungja wab	Lokasi
					Data Awal	2022					
						K	Rp				
			Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	0 event	5		5			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Administrasi umum perangkat daerah sesuai standar/administrasi umum perangkat daerah yang tersedia x100%	100%	100%	145.222.200	100%	145.222.200		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 komponen	2	2.544.800	2	2.544.800		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	19 macam	1	2.180.700	1	2.180.700		
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	2 macam	0		-			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	13 macam	8	2.431.700	8	2.431.700		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	30 macam	25	77.376.000	25	77.376.000		
			Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	327 dos	35		35			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggungja wab	Lokasi
					Data Awal	2022					
						K	Rp				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 cetakan	3	12.580.000	3	12.580.000		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	1	5.400.000	1	5.400.000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	103 rakor	20	42.709.000	20	42.709.000		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar/ penyediaan jasa penunjang urusan yang dilaksanakan x 100%	100%	100%	113.608.000	100%	113.608.000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan	4	3	113.608.000	3	113.608.000		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga penunjang perkantoran	Jumlah tenaga penunjang perkantoran				36			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	BMD yang terpelihara sesuai standar/BMD yang terpelihara x100%	100%	100%	74.344.550	100%	74.344.550		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggungja wab	Lokasi
					Data Awal	2022					
						K	Rp				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	10 unit	10	51.678.950	10	51.678.950		
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	2 unit	2		2			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 macam	3	9.048.400	3	9.048.400		
		Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	1	5.100.000	1	5.100.000		
		Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 macam	2	8.517.200	2	8.517.200		

Lampiran B

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
1	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0.30 %	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	45 %	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	1 dokumen	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun	1 laporan	22,847,500
							Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	40 %	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase investor baru yang terverifikasi	20%	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kerjasama penanaman modal yang dilaksanakan	1 kerjasama	356,109,794

N O	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	Uraian	Indikator Tujuan	Targ et	Uraian	Indikator Sasaran	Targ et	Uraian	Indikator Program	Tar get	Uraian	Indikator Kegiatan	Targ et	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Targe t	Anggar an
							Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	99.5%	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	3%	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan izin usaha yang terverifikasi berkewajiban memenuhi komitmen	1030 izin	138,828,500
													Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin yang terbit secara tepat waktu	3748 izin	217,714,447
													Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	4 layan an	147,285,200

N O	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	Uraian	Indikator Tujuan	Targ et	Uraian	Indikator Sasaran	Targ et	Uraian	Indikator Program	Tar get	Uraian	Indikator Kegiatan	Targ et	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Targe t	Anggar an
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	75 %	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	50 perusahaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan monev Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Moda	300 perusahaan	35,000,000
													Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pendampingan dalam hal Laporan Kegiatan Penanaman Modal	30 perusahaan	242,354,900
													Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	80 perusahaan	108,381,100

N O	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	Uraian	Indikator Tujuan	Targ et	Uraian	Indikator Sasaran	Targ et	Uraian	Indikator Program	Tar get	Uraian	Indikator Kegiatan	Targ et	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Targe t	Anggar an
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %							4,155,994,787

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERU EKO PRAMONO, S.STP
Jabatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : WALIKOTA BLITAR
Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 18 Oktober 2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP



HERU EKO PRAMONO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BLITAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi	167.20 (Milyar Rup)
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.80 (Nilai)

No	PROGRAM	Anggaran	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.155.994.787,00	DAU
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	22.847.500,00	DAU
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	356.109.794,00	DAU
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	503.828.147,00	DAU
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	385.736.000,00	DAU, DAK
JUMLAH		5.424.516.228,00	

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 18 Oktober 2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP



HERFEKO PRAMONO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Lampiran D

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu (Rp)	Realisasi	%	KET
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,2	345,22	206.5%		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	22.847.500	22.479.100	98,39%	
								Program Promosi Penanaman Modal	356.109.794	353.716.234	99,33%	
								Program Pelayananan Penanaman Modal	503.828.147	491.181.131	97,49%	
								Program Pengendalian Penanaman Modal	385.736.000	301.762.260	78,23%	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.155.994.787	3.953.802.809	95,13%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu (Rp)	Realisasi	%	KET
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100						

Blitar, 2 Maret 2023
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PTSP KOTA BLITAR



HERU EKO PRAMONO, S.STP. MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197504091996021002